



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI  
KE PROVINSI JAWA TIMUR**

**PENINJAUAN KILANG MINYAK  
DI KABUPATEN TUBAN**

**MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2018-2019**

**8 – 10 Maret 2019**

**KOMISI VII  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
2019**

## **BAGIAN I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Bahan bakar minyak dan gas merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga jaminan ketersediaannya harus selalu terjaga. Sebagai alat produksi yang vital bagi masyarakat, keberadaan bahan bakar minyak sangat berpengaruh pada banyak aspek kehidupan masyarakat serta berpengaruh besar pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas negara dalam hal ini lembaga legislatif DPR RI, Pemerintah dan badan usaha milik negara di bidang minyak dan gas bumi termasuk juga badan usaha swasta nasional berkewajiban untuk mengamankan dan menjamin ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas untuk masyarakat. Untuk itu, negara dalam hal ini DPR RI dan Pemerintah perlu mendorong peningkatan kapasitas produksi bahan bakar minyak di dalam negeri dengan memaksimalkan potensi kilang yang ada, khususnya dengan memaksimalkan kilang-kilang yang dikelola oleh badan usaha milik negara.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dari waktu ke waktu semakin mendapatkan banyak tantangannya dan berbagai macam permasalahan. Tantangan terbesar adalah semakin tingginya kebutuhan minyak dan gas bumi untuk kegiatan ekonomi dan kebutuhan di berbagai bidang kehidupan, namun sebaliknya cadangan dan ketersediaannya semakin berkurang, serta sementara itu kemampuan produksi pengolahan bahan bakar minyak di dalam negeri tidak dapat meningkat secara signifikan. Sektor Migas juga mempunyai kontribusi penting terhadap keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dapat dipastikan bahwa sebagian besar aktifitas usaha yang dilakukan oleh masyarakat

akan membutuhkan energi, yang sampai saat ini bersumber dari minyak dan gas bumi. Sampai saat ini, Migas merupakan salah satu faktor penting pemicu pertumbuhan perekonomian. Artinya, begitu penting sektor ini untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di Indonesia.

Bahan bakar minyak dan gas sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka jaminan ketersediaannya harus selalu terjaga untuk keamanan pasokan energi nasional. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sangat penting untuk bagi negara melalui badan usaha milik negara untuk menguasai kilang sebagai tiang penyangga produksi bahan bakar migas nasional. Sebagai tindak lanjut dari kunjungan Komisi VII DPR RI pada tahun 2018 ke Kilang TPPI Tuban yang terdapat catatan sebagai berikut:

1. Keberadaan kilang minyak TPPI masih mengalami kendala dalam operasionalnya karena masih terkait dengan beban hutang perusahaan kepada PT Pertamina (Persero) yang cukup besar sehingga produksinya saat ini masih tergantung atas permintaan BBM dan LPG Pertamina.
2. TPPI akan dapat meningkatkan keuntungannya apabila dapat memanfaatkan asetnya sepenuhnya untuk produksi diluar BBM seperti petrokimia. Produksi Petrokimia membutuhkan modal kerja yang cukup besar dari PT Pertamina (Persero).
3. PT Pertamina (Persero) membutuhkan dukungan Pemerintah dan DPR RI dalam melakukan aksi korporasi untuk menguasai saham TPPI minimal 75% sehingga dapat mengendalikan sepenuhnya TPPI.
4. Keberadaan kilang minyak TPPI sangat dibutuhkan oleh negara dalam rangka mengurangi porsi BBM impor dan LPG impor sehingga dapat menghemat devisa dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dollar AS.

Maka Komisi VII DPR RI kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tuban Jawa Timur untuk memastikan tindaklanjut kunjungan tersebut dan meninjau proses pengembangan dan keberlanjutan Kilang TPPI dan peninjauan pelaksanaan proyek kilang PT Pertamina di Tuban.

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Jawa Timur ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib beserta perubahannya.
3. Keputusan Rapat Internal Komisi VII DPR RI tentang Pembahasan Agenda Kegiatan Komisi VII Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud kunjungan kerja spesifik ini sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Komisi VII DPR RI untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha pengolahan minyak dan gas bumi berjalan dengan baik. Sedangkan tujuan kunjungan lapangan ini secara khusus adalah:

1. Melihat langsung dan mendapatkan informasi terkini tentang pelaksanaan kegiatan usaha kilang minyak di Tuban dan status kondisi eksisting kegiatan operasionalnya serta rencana pengembangannya.
2. Identifikasi masalah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek Kilang PT Pertamina dan pengembangan Kilang TPPI dan

bagaimana upaya-upaya penangannya, serta dukungan apa yang diharapkan dari Komisi VII DPR RI.

3. Mendapatkan data dan informasi tentang kontribusi perusahaan bagi pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar lokasi kilang dan realisasi komitmen CSR dan bina lingkungan.
4. Untuk mengetahui sejauhmana implementasi dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **D. WAKTU KUNJUNGAN DAN MITRA KERJA**

Waktu pelaksanaan kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur direncanakan tanggal 8 sampai dengan 10 Maret 2019 dengan jadwal terdapat dalam lampiran dan dengan mitra kerja sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM,
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
3. SKK Migas,
4. PT Pertamina (Persero),
5. PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI),
6. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Tuban.

#### **E. SUSUNAN DAN ANGGOTA**

Kunjungan spesifik diikuti oleh anggota Komisi VII DPR RI dengan didampingi oleh Sekretariat Komisi VII DPR RI sebagaimana daftar terdapat dalam lampiran.

## **BAGIAN II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA**

Pelaksanaan kegiatan dan hasil kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Tuban Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

1. TPPI adalah Kilang Petrokimia dengan kapasitas 100 Kbd/hari dengan izin usaha pengolahan minyak bumi KepMen ESDM No 2161K/20/MEM/2006. Kilang TPPI dapat menghasilkan hingga 1 Juta Ton/tahun Produk aromatik dan 900 ribu Bbl/bulan komponen Mogas atau ~1,8 juta bbl/bulan Mogas.
2. TPPI berlokasi sekitar 120km disebelah barat Surabaya, dekat kota Tuban, dan menempati area sekitar 200 hektar. 200 hektar lahan tersedia milik TPPI, baru sekitar 60 hektar yang dimanfaatkan, masih ada sisa lahan sekitar 140 hektar yang belum dimanfaatkan.
3. Kilang TPPI dimiliki oleh pemegang saham yang terdiri atas PT Pertamina sebesar 48,59%, PPA sebesar 25,93%, Vitol BV sebesar 8,81%, Polytama Propindo sebesar 5,15% dan pemegang saham lain sebesar 11,52%. Kilang TPPI mulai beroperasi (Feed In) pada tahun Maret 2006 dan Sejak Oktober 2012, TPPI dijalankan oleh manajemen perwakilan dari Pertamina dan PPA.
4. Manfaat keberadaan TPP antara lain adanya pendapatan negara dari pajak, pengurangan impor bahan baku produk petrokimia, pemasok BBM dan LPG, peningkatan ekonomi di Tuban dan sekitarnya, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesadaran lingkungan, dan motivator pendidikan.
5. Kilang TPPI mempunyai fasilitas sebagai berikut:
  - a. Aromatic Complex dengan kapasitas terpasang 100 kBD memproses condensate

- b. Fasilitas Utility termasuk Pembangkit Listrik, Pembangkit Uap, Pengolahan Air Laut menjadi Air Tawar, IA/PA/N<sub>2</sub>, Pengolahan Limbah Cair dan Gas
  - c. Fasilitas tangki
  - d. Fasilitas Pelabuhan: 3 Ports & 1 SPM termasuk pemecah gelombang
  - e. Fasilitas Fire Fighting dan Klinik
  - f. Fasilitas Laboratory
  - g. Workshop & Warehouse
  - h. Jalur perpipaian dari TPPI ke TBBM Pertamina dan sebaliknya untuk distribusi produk Mogas
6. TPPI merupakan kilang industri hulu petrokimia yang menjadi basis utama bagi pengembangan industri petrokimia nasional karena menjadi pemasok bahan baku bagi industri hilir petrokimia
  7. Masalah yang dialami oleh TPPI antara lain keterbatasan *working capital* dan *capital expenditure*, belum *bankable*, jumlah hutang relatif tinggi sehingga kewajiban membayar bunga tinggi, dan fluktuasi harga *condensate* dan *product*. Secara umum masalah TPPI adalah masalah keuangan, masalah hukum dan masalah operasional.
  8. Tantangan operasional dengan beroperasinya kilang TPPI, seluruh kondensat dalam negeri dapat diolah untuk menghasilkan BBM dan Petrokimia. Namun masih tetap diperlukan kondensat impor untuk memenuhi kebutuhan secara keseluruhan (sebesar 52,6% dari Total Kebutuhan) untuk tahun operasi 2018.
  9. Dukungan yang diperlukan oleh TPPI, secara operasional memerlukan dukungan peningkatan suplai kondensat lokal dari SKK Migas, izin ekspor light naphtha, kerjasama dengan konsumen lokal. Sedangkan secara Bisnis memerlukan dukungan perbankan lokal dan proses konversi utang menjadi saham agar tidak menjadi beban yang berkelanjutan.

10. TPPI perlu menjalankan manajemen secara mandiri dengan secara tanggap mengambil keputusan-keputusan bisnis dan hal ini telah diputuskan oleh direksi PT Pertamina (Persero) yang juga telah memberikan keleluasaan kepada TPPI untuk mandiri. Namun perlu dipertimbangkan apakah dengan mandiri TPPI akan bisa *survive* bertahan untuk melakukan operasional, untuk itu perlu dilakukan mitigasi risiko dari aspek keuangan dan aspek hukum, termasuk juga perlu melakukan studi dan menyiapkan pendanaan.

### **Rencana Pembangunan Kilang Baru PT Pertamina (Persero)**

11. Program RDMP dan GRR Pertamina menjadi solusi untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional, mendukung pertumbuhan industri petrokimia dan memperkuat bisnis hilir Pertamina. Untuk itu tepat dan sesuai kebutuhan jika PT Pertamina (Persero) berencana membangun kilang baru di Tuban.
12. Proses pembangunan kilang baru di Tuban saat ini sudah pada tahap penentuan dan penetapan lokasi, dan proses tukar menukar barang milik negara yang menjadi lokasi pembangunan kilang sudah disetujui oleh Presiden. Selanjutnya dilakukan proses penyelesaian dengan warga masyarakat di lokasi tersebut. PT Pertamina (persero) akan memberikan tali asih berupa dana kepada warga masyarakat penggarap lahan sebanyak 766 orang yang berada di 4 desa. Jadi dari aspek pengadaan lahan lokasi kilang sudah tidak terdapat masalah.
13. Pemerintah daerah berharap agar lokasi lahan yang terdapat permukiman warga perlu solusi relokasi warga. Selain itu perlu ada pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat lokal yang terdampak langsung dengan lokasi pembangunan kilang agar masyarakat juga dapat menerima manfaat langsung dari pembangunan kilang. Diharapkan ke depan pada saat kilang beroperasi, warga yang terdampak dapat bekerja di kilang tersebut. Terhadap usulan yang disampaikan oleh Pemkab Tuban, Direksi PT Pertamina memberikan



tanggapan bahwa akan ada penandatanganan MOU dengan Pemkab Tuban untuk pelaksanaan pelatihan bagi masyarakat, pemberian beasiswa kepada masyarakat, serta warga akan dipekerjakan dalam kilang. Intinya Pertamina meyakinkan bahwa pembangunan kilang baru ini akan memberikan dampak positif kepada warga masyarakat dan pemerintah daerah.

14. Saat ini sedang disiapkan untuk melakukan groundbreaking yang dihadiri oleh Presiden RI, untuk itu perlu memastikan bahwa semua masalah persiapan dan pengadaan lahan sudah selesai serta ada jaminan bahwa nanti tidak terjadi gejolak dari warga masyarakat.

### **BAGIAN III**

#### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dari pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Tuban Provinsi Jawa Timur dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kilang TPPI mempunyai peran strategis, untuk itu perlu didukung agar TPPI dapat menyelesaikan masalahnya serta memaksimalkan potensi produksinya. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta agar PT TPPI menjalankan manajemen secara mandiri sebagaimana telah diputuskan oleh direksi PT Pertamina (Persero) termasuk dalam hal mengambil keputusan kerja sama dengan pihak lain untuk keberlanjutan dan mengembangkan TPPI.
2. Rencana pembangunan kilang baru PT Pertamina (Persero) sudah menyelesaikan tahap pengadaan lahan dan relatif tidak terdapat masalah, untuk itu akan segera dilakukan *groundbreaking*. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mendukung pembangunan kilang baru PT Pertamina (Persero) dengan memberikan catatan agar masalah dengan warga masyarakat dan masalah lingkungan hidup dapat diatasi dengan baik.

#### **PENUTUP**

Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPR RI untuk dapat ditindaklanjuti.

Jakarta, 13 Maret 2019  
Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI  
Ketua Tim,

**Ir. H.M. Ridwan Hisjam**